

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional merupakan aspek penting demi mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia seperti yang tertera didalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan pembangunan dari kehidupan masyarakat dan pengelolaan pada negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Di bidang sosial, upaya pembangunan pada umumnya ditujukan untuk mengembangkan nilai dan sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi inovasi, pembangunan, dan pembangunan bangsa. Ini termasuk mengembangkan tenaga kerja yang efektif untuk semangat kewirausahaan. Supaya pembangunan berjalan dengan lancar, pemerintah harus menyediakan dana untuk pembangunan tersebut. Setiap pemerintah daerah memiliki kebijakan tersendiri untuk memajukan daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah demi membiayai pembangunan di daerah tersebut.

Pemerintah menyediakan pekerjaan umum, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dimana lembaga non pemerintah tidak dapat memberikan atau menyediakan kepada masyarakat dalam beberapa bidang sebagai bentuk usaha pemerintah dari untuk meningkatkan

kesejahteraan sosial, dengan mempraktikkan pada kebijakan ekonomi yang dapat berguna bagi seluruh masyarakatnya, dan prosedur lain untuk pelestarian dan pemberdayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup (Zubaidr, 2012). Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An Nisa': 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

Dari ayat diatas menjelaskan tentang nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan amanah. Pemerintah yang baik dan adil akan mampu mengimplementasi nilai-nilai yang ada didalam surat An-Nisa: 58 dan mendengarkan aspirasi dari rakyat- rakyatnya baik yang berada dikota maupun didesa, yang kaya maupun yang miskin, dan tidak memandang status dari rakyatnya. Pemerintah wajib berlaku adil kepada rakyat yang dipimpinnya. Karena keadilan sangat dekat dengan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Tuhannya.

Terdapat dua kriteria penting suatu daerah bisa dikategorikan mampu menggerakkan otonomi daerah dengan baik, yang pertama dengan mengamati kapasitas keuangan daerah untuk mengklasifikasikan daerah dengan

memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menyelidiki, mengelola, dan menggunakan keuangan yang sesuai untuk sumber daya keuangan. Kedua ketersediaan sumber daya daerah untuk menutupi biaya administrasi, di sisi lain kurang bergantung pada bantuan pemerintah. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi mayoritas pendanaan dibantu pada keseimbangan antara kebijakan pusat dan daerah. (Anggraini, 2015). Pendapatan asli daerah yaitu sumber pendanaan pada peluang yang dimiliki wilayah yang kemudian dijalankan pemerintah daerah dan berasal pada pajak daerah, pada hasil distribusi daerah, pada pengelolaan kekayaan daerah dan pada hasil lainnya. Sumber pendapatan daerah yang paling banyak memberikan dana dan paling signifikan berasal dari industri pajak daerah. Pada pajak daerah perlu diurus secara ahli dan samar-samar untuk mengintensifkan dan memajukan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Lestari, 2017). Salah satu perbedaan mendasar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah adalah bahwa daerah memiliki kontrol penuh atas keuangannya sendiri. Kondisi ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah daerahlah yang paling memahami atau memahami kondisi di wilayahnya (Artini, 2017).

Rata-rata sumber PAD terbesar suatu daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat beberapa wilayah yang memiliki banya potensi dalam membantu membangun perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya

adalah Kabupaten Sleman. Banyaknya penduduk di Kabupaten Sleman menjadi salah satu keunggulan Kabupaten Sleman dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, dengan bermacam-macam kegiatan yang terjadi dimasyarakat dan beranjaknya kegiatan yang terjadi dimasyarakat dapat memicu derasnya dan tumbuhnya ekonomi di Kabupaten Sleman sekaligus meningkatkan perekonomian dimasyarakat. Entitas Pendapatan Asli Daerah menjadi suplai dana yang besar bagi pemerintah daerah.

Sesuai yang sudah dibahas, penulis berusaha meninjau hal tersebut, untuk mengetahui Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Efisiensi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Sleman (Tahun 2017-2020).

B. BATASAN MASALAH

Peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini, agar pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian tidak keluar dari maksud dan tujuan penelitian ini dibuat. Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu pada perhitungan efektivitas, kontribusi, dan efisiensi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Sleman (Tahun 2017-2020).

C. RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah efektivitas, kontribusi, dan efisiensi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Sleman pada tahun 2017- 2020 ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dari masalah yang telah diidentifikasi tersebut sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas, kontribusi, dan efisiensi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Sleman pada tahun 2017-2020.

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk melatih mahasiswa dalam membaca dan menganalisis laporan realisasi anggaran daerah serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai analisis efektivitas, kontribusi, dan efisiensi dari pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk pemerintah Kabupaten Sleman sejauh mana efektivitas, kontribusi, dan efisiensi dari pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan serta memaksimalkan pendapatan daerah di Kabupaten Sleman.